

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional memiliki ratusan definisi yang dikemukakan oleh para ahli secara global. Namun pendapat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu definisi secara sempit (*narrow definition*) dan definisi secara luas (*broad definition*). (Bakry, 2017, p. 61)

Definisi hubungan Internasional secara sempit adalah hubungan antarnegara (*inter-states relations*) atau hubungan antarbangsa (*relations between/among nations*). Seperti yang disampaikan oleh Chris Brown dan Kirsten Ainley., menurut mereka Hubungan Internasional adalah hubungan negara-negara. Hal tersebut memiliki arti bahwa hubungan internasional dapat dimaknai sebagai aksi - reaksi dua negara berdaulat atau lebih yang diwakilkan oleh para elite berkuasa dari masing-masing negara. (Brown & Ainley, 2009, p. 1)

Definisi sempit tentang hubungan internasional banyak bermunculan sebelum berakhirnya Perang Dingin yang dapat dibuktikan pada buku-buku yang terbit sebelum tahun 1990. Hal tersebut ditandai dengan mayoritas cara pandang hubungan internasional erat kaitannya dengan politik internasional. Seperti contoh pendapat Norman Padelford dan George Lincoln yang memandang hubungan internasional merupakan hubungan antarnegara dan hakikat hubungan antarnegara adalah politik internasional (Padelford & Lincoln, 1957, p. 4). Adapun pengertian

mengenai politik internasional yang dimaksud merujuk pada interaksi kebijakan negara-negara dalam pola hubungan kekuasaan yang berubah.

Selain menekankan pada politik internasional, definisi sempit tentang hubungan internasional juga banyak berorientasi pada negara. Seperti menurut pendapat ahli ternama dalam studi hubungan internasional, Hans Morgenthau. Menurutnya hubungan internasional merupakan arena memperjuangkan kekuasaan dan kepentingan diantara bangsa-bangsa (Morgenthau, 1978, p. 461). Sejalan dengan Morgenthau, Joyce P. Kaufman mendefinisikan hubungan internasional sebagai bidang studi yang mempelajari keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara yang mempunyai dampak terhadap hubungan keluar negeri tersebut (Kaufman, 2022, p. 1).

Seiring dengan revolusi pada bidang teknologi dan komunikasi, kini dunia telah menjadi seperti *global village* yang bermakna bukan hanya negara saja yang dapat berinteraksi melampaui batas negara, melainkan aktor-aktor non-negara seperti perusahaan atau individu pun dapat menjadi aktor hubungan internasional. Perkembangan tersebut berdampak pada kompleksitas isu-isu yang terjadi dalam dunia internasional, seperti isu-isu non-politik yang mencakup bidang ekonomi, keamanan, hukum, kebudayaan, teknologi dan lain sebagainya (Darmayadi, 2022, p. 22).

Dengan begitu mayoritas para sarjana hubungan internasional saat ini telah menyepakati bahwa hubungan internasional tidak lagi identik dengan politik internasional saja dan tidak melulu berorientasi pada aktor negara saja. Sehingga lahirlah pendapat-pendapat baru yang mendefinisikan hubungan internasional

secara lebih luas, seperti Keith Shimko. Menurutnya, hubungan internasional merupakan keseluruhan hal-hal kompleks yang merujuk pada hubungan-hubungan semua negara beserta unsur-unsur populasi dan entitas negaranya baik dalam bidang budaya, ekonomi, militer, politik, hingga sosial (Shimko, 2013, p. xviii).

Definisi hubungan internasional secara luas juga disampaikan oleh Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Menurut keduanya hubungan internasional adalah studi yang mempelajari interaksi antarnegara dan antar aktor internasional dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan dan sosial. Dengan kata lain hubungan internasional memiliki tujuan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam dunia internasional dan menemukan cara terbaik dalam menjaga stabilitas dan keamanan dunia. Studi ini juga membantu menganalisis kebijakan luar negeri, para aktor diplomasi, perjanjian internasional, organisasi internasional dan berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan antarnegara (Perwita & Yani, 2005, p. 32).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam studi hubungan internasional, kepentingan nasional menjadi konsep penting bagi suatu negara menentukan arah kebijakannya demi memenuhi kebutuhan, tujuan, dan keamanan negaranya. Menurut Lerche, kepentingan nasional merujuk pada sebuah konsep abstrak yaitu segala hal yang dianggap penting oleh suatu negara, mulai dari keamanan nasional, integritas wilayah, kemakmuran ekonomi, stabilitas politik dan kesejahteraan rakyatnya (Lerche, 2002, p. 12).

Kepentingan nasional dapat dipengaruhi oleh letak geografis suatu negara, kondisi dan karakteristik masyarakat serta tujuan dan strategi politik negaranya. Joseph S. Nye dalam bukunya yang berjudul “*Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*”, mendefinisikan kepentingan nasional merupakan upaya suatu negara untuk menjaga kepentingannya dalam keamanan dan stabilitas dalam negerinya serta memenuhi kebutuhan ekonomi dan politik negaranya di arena internasional (Nye, 2008, p. 19).

Adapun hal-hal yang dianggap penting dalam kepentingan nasional diantaranya; 1) Keamanan nasional yang berarti negara wajib memberikan perlindungan terhadap keutuhan negaranya dari berbagai ancaman keamanan yang datang dari dalam maupun luar negeri; 2) Kekayaan nasional yang merujuk kepada kepentingan ekonomi, sumber daya alam juga perdagangan internasional serta; 3) Hubungan internasional guna membangun dan memperkuat hubungan antarnegara baik bilateral maupun multilateral.

Dalam buku berjudul “*Introduction to International Relations*”, Perwita dan Yani juga menjelaskan mengenai kepentingan nasional, menurut keduanya kepentingan nasional harus menjadi landasan suatu negara dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Maka wajib hukumnya bagi suatu negara mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kepentingan nasional baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hal tersebut dilakukan sebab kepentingan nasional akan sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Di Indonesia, kepentingan nasional Indonesia berkaitan erat dengan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Sebab letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan kondisi masyarakat yang heterogen menuntut Indonesia untuk mampu melindungi hak dan kepentingan serta memperkuat ekonomi masyarakatnya. Menurut Djoko Suyanto dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Internasional: Pendekatan Multidisipliner”, beliau berhasil mengklasifikasikan kepentingan nasional Indonesia ke dalam lima aspek sebagai berikut:

1. Keamanan Nasional: merujuk pada upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan yang mencakup kebebasan Indonesia menentukan nasibnya sendiri, dan menentukan kebijakan politiknya sendiri juga integritas negaranya dari ancaman keamanan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Serta menjaga keutuhan wilayahnya yang terdiri dari ribuan pulauanya.
2. Aspek Politik: merujuk pada upaya Indonesia memperkuat bentuk negaranya sebagai negara demokrasi, memastikan stabilitas politik, mengutamakan hak asasi manusia, dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di regional maupun global. Hal tersebut mencakup kepentingan internasional Indonesia yang memperjuangkan hak-hak bangsanya dan berkontribusi dalam perdamaian dunia melalui forum internasional.
3. Aspek Ekonomi: merujuk pada upaya Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengembangkan industri dan pertanian Indonesia dengan menjaga dan memperkuat kerjasama ekonomi

bilateral maupun multilateral. Saat ini kepentingan nasional Indonesia dalam aspek ekonomi mencakup pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk meningkatkan daya saing, memperkuat industri dalam produktivitas, dan memperjuangkan kepentingan ekonomi di kancah internasional.

4. Aspek Sosial-Budaya: merujuk pada upaya Indonesia memperkuat identitas nasionalnya dengan memperkenalkan budaya, menjaga kerukunan antarsuku, dan memperkuat hubungan sosial. Saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus cukup penting dalam kepentingan nasional Indonesia, dengan meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat bersaing secara global.
5. Aspek Lingkungan Hidup: merujuk pada upaya Indonesia menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup dan berperan aktif dalam isu-isu iklim global di forum-forum internasional. Diketahui Indonesia sebagai negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan yang menyimpan kekayaan sumber daya alam menjadi kepentingan nasional Indonesia yang penting untuk dikembangkan dan dilindungi (Suyanto, 2011, p. 97).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Sebagai salah satu bentuk strategi negara memenuhi kepentingan nasionalnya di tingkat internasional adalah dengan merumuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri banyak diartikan sebagai upaya suatu negara yang diwakilkan oleh sebuah pemerintahannya dalam memperjuangkan kepentingan

nasional di tingkat internasional yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, politik, dan budaya.

Serupa dengan menentukan kepentingan nasional, dalam merumuskan kebijakan luar negeri-pun perlu mempertimbangkan aspek-aspek internal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik negara tersebut, serta aspek eksternal yang meliputi hubungan bilateral dan multilateral negara tersebut. Dengan kebijakan luar negeri, suatu negara dapat memperkuat posisi dan pengaruhnya di tingkat global melalui promosi nilai-nilai yang dianggap penting oleh negaranya (Morgenthau, 1978, p. 461).

Adapun aspek-aspek kebijakan luar negeri yang umum dianggap penting dalam studi hubungan internasional seperti; 1) tujuan dan strategi kebijakan luar negeri yang mencakup pertahanan kepentingan ekonomi dan politik, mempromosikan nilai dan kepentingan nasional serta melindungi keamanan nasional; 2) menjaga hubungan bilateral dan multilateral guna memperluas pengaruh dan memperjuangkan status di tingkat internasional; 3) peran aktor kebijakan luar negeri yang meliputi perangkat pemerintahan, diplomat, dan aktor non-negara dalam pengambilan keputusan.

Dalam buku berjudul "*The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory*" Kalevi Holsti mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan luar negeri. Menurutnya kebijakan luar negeri adalah sebuah bentuk ide dan gagasan dalam sebuah rumusan yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi pada suatu masalah atau memberikan perubahan pada wilayah tersebut.

Menurutnya juga, terdapat lima kategori alat penentu kebijakan luar negeri, seperti ekonomi, diplomasi, intervensi, operasi militer dan persenjataan, pengaruh politik dan perang (Holsti, 1985, p. 398).

Adapun rumusan tujuan suatu negara memutuskan kebijakan luar negerinya, sebagai berikut:

1. Nilai, menjadi faktor terpenting dalam merumuskan kebijakan luar negeri, sebab kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tujuan suatu negara.
2. Waktu, sebagai target yang harus dipenuhi dalam sebuah perumusan kebijakan luar negeri apakah kebijakan tersebut untuk target pemenuhan dalam jangka pendek atau jangka panjang.
3. Tuntutan tujuan yang dijalankan pemerintah suatu negara wajib dilakukan berdasarkan komitmen yg telah disepakati.
4. Kapabilitas negara dalam merancang dan melaksanakan kebijakan luar negeri demi keamanan nasional.

Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain. Hal tersebut menjadi bentuk aksi reaksi pertemuan politik luar negeri di arena politik internasional. Aksi-reaksi tersebut dipengaruhi oleh variabel internal yang meliputi ekonomi, militer, politik, sosial dan budaya, dan variabel eksternal yang mencakup geopolitik, sifat suatu negara, dan kepentingan nasional negara tujuan.

2.1.4 Idiosinkratik

Idiosinkratik terdiri dari kata “ideologi” yang mengacu pada kerangka analisis dalam memahami masalah, dan “sinkratik” gabungan harmonis dari aspek yang positif. Maka definisi idiosinkratik secara umum adalah aspek seperti nilai, bakat, dan pengalaman yang melekat di dalam diri seseorang sehingga membentuk proses pengambil keputusan dan kebijakan. Dalam studi politik, idiosinkratik digunakan sebagai istilah ketika individu dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang memiliki dampak secara keseluruhan.

Menurut Coulombis dan Wolfe, idiosinkratik merupakan variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra, dan karakteristik pribadi individu yang membuat keputusan.

”Idiosyncratic as the distinctive characteristics or preferences of leaders or actors in the international system that can influence their foreign policy and decisions. For example, the personal attitudes or views of a national leader can have a significant impact on that country's foreign policy, even if they do not always reflect the broader national interests or needs.” (Coulombis & Wolfe, 1978, pp. 306–307)

Idiosinkratik meliputi gabungan mental seseorang yang telah melewati berbagai tahapan dalam perkembangan hidupnya. Hal tersebut meliputi karakteristik, intelektual, temperamen, moralitas, serta sikap yang terbentuk dari sebuah pengalaman hidup dan perkembangan hidup seorang individu secara alami (Warren, 1920, p. 362).

Pengaruh idiosinkratik seorang individu dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan pola variasi unik dalam politik luar negeri. Fenomena tersebut meliputi faktor pengalaman hidup yang mempengaruhi seseorang pengambil

kebijakan hingga pada akhirnya berdampak terhadap hubungan luar negeri suatu negara. Secara konsep idiosinkratik mengacu pada kualitas atau karakteristik unik individu yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia internasional.

Dalam hubungan internasional, idiosinkratik seorang pemimpin menjadi faktor penting dalam sebuah pola kebijakan luar negeri suatu negara, aktifitas diplomasi, dan perilaku negara dalam sistem internasional. Idiosinkratik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, ideologi politik, budaya dan kepribadian seorang pemimpin juga faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku suatu negara dalam hubungan internasional.

Politik-ideologi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pendapat dan perilaku negara dalam lingkup hubungan internasional. Faktor ini juga mampu mempengaruhi pandangan suatu negara terhadap isu global yang kemudian menghasilkan kebijakan luar negeri yang dapat mengintervensi dunia internasional. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kepribadian pemimpin suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negaranya.

Seperangkat kepribadian yang dimiliki kepala negara meliputi pengalaman hidup, dan pendapat politik pribadi membentuk karakteristik seorang kepala negara yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam menentukan kebijakan luar negeri. Para peneliti hubungan internasional menyepakati nilai karakteristik pemimpin negara yang dapat memberikan pengaruh pada perilaku negara dalam sistem internasional.

Hudson menjelaskan bahwa idiosinkratik menjadi faktor penting dalam sebuah sistem internasional, setiap negara mempunyai karakteristik unik yang dapat mempengaruhi tindakan dan kebijakan luar negerinya. Pendapatnya tersebut tercantum dalam bukunya yang berjudul “*Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary*”(Hudson, 2007, p. 107).

Untuk memahami idiosinkratik dalam studi hubungan internasional, terdapat tiga indikator penting dalam proses analisis idiosinkratik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, sebagai berikut:

1. Motivasi individu: indikator ini merujuk pada faktor psikologi dan emosional yang menjadi motivasi individu mengambil sebuah keputusan, dalam hal ini kebijakan luar negeri. Seperti ambisi, kepercayaan diri, keinginan memberi citra diri yang baik dan keinginan memenuhi tujuan pribadi, menjadi contoh dari motivasi individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Persepsi individu: indikator ini merupakan cara individu menempatkan sudut pandangnya terhadap situasi dan informasi dalam menentukan kebijakan luar negeri. Cara sudut pandang individu ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman, ideologi/prinsip hidup, serta kepercayaan terhadap politik.
3. Gaya kepemimpinan: indikator ini merujuk pada gaya kepemimpinan seorang kepala negara. Seperti kepemimpinan otoriter, partisipatif, transaksional, demokratis, dan lain sebagainya, sebagai contoh dari macam-macam gaya kepemimpinan.

Dengan mengacu pada tiga indikator di atas, dapat membantu memahami bagaimana pengaruh idiosinkratik dapat mempengaruhi proses pengambilan dan implementasi kebijakan luar negeri yang berbeda.

2.1.5 Karakteristik Pribadi Politik

Margaret G. Hermann memaparkan dalam karya ilmiahnya bahwa, untuk dapat memahami hubungan antara perilaku kebijakan luar negeri dengan karakteristik pribadi pemimpin politik, terdapat empat dimensi pribadi politik mulai dari kepercayaan diri, otonom, orientasi terhadap resiko hingga kebutuhan untuk mencapai tujuan (Hermann, 1980, p. 7).

Dalam implementasi ideologi dan tujuan suatu negara, terdapat pengaruh yang cukup penting dari karakteristik seorang pemimpin negara tersebut. Untuk itu, dalam proses menganalisis idiosinkratik yang ada di dalam diri seorang pemimpin, perlu memahami ciri seperti keyakinan, motivasi, gaya kepemimpinan (pengambilan keputusan), dan gaya interpersonal.

Dalam memahami pola idiosinkratik seseorang, maka perlu merunutkan kepribadian individu tersebut. Pada umumnya, terdapat dua kategori kepribadian individu, yaitu kepribadian terbuka dan kepribadian tertutup. Adapun pengelompokan kepribadian individu berdasarkan tingkatan dominasi karakter seseorang. Berikut empat tingkatan dominasi kepribadian individu:

1. *Block Leader* (Pemimpin Blok): Pada tingkat ini, individu cenderung memiliki kepribadian yang tertutup namun kepemimpinannya sangat

mendominasi. *Block Leader* cenderung memiliki keteguhan dan dominasi yang kuat dalam mencapai tujuannya.

2. *World Leader* (Pemimpin Dunia): Pada tingkat ini merupakan gabungan karakteristik individu terbuka dengan kepemimpinan yang dominan. Karakter ini ditandai dengan perilaku pemimpin yang memiliki kecenderungan pada kekuatan militer, namun cukup fleksibel, dan menggunakan pandangan pragmatis dalam analisis politiknya.
3. *Custodian/Keeper* (Pemelihara): Berbeda dengan dua karakter sebelumnya, *Custodian* cenderung memiliki ciri kepribadian tertutup dan kepemimpinannya kurang mendominasi. Karakter ini terbiasa untuk menjaga status quo dalam keputusan politiknya.
4. *Conciliator* (Konsiliator): karakter ini merupakan gabungan kepribadian terbuka namun kepemimpinannya kurang mendominasi. *Conciliator* memiliki ciri suka membantu, walau kurang konsisten.

Lebih daripada itu, masih dalam hasil penelitian “*Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders*” yang ditulis oleh Margaret G. Hermann, pemimpin negara di seluruh dunia memiliki karakteristik kepribadian dengan gambaran sebagai berikut:

1. Nasionalisme: Karakter ini sering dijadikan tolak ukur kesuksesan pemimpin negara bagi masyarakatnya. Pasalnya nasionalisme adalah bentuk rasa cinta tanah air meliputi menjaga kedaulatan dan kehormatan negaranya. Karakter ini tentu akan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan.

2. Pelatihan Urusan Luar Negeri: Karakter ini dimiliki oleh individu yang telah lama menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan politik, individu ini cenderung memberikan pemahaman terkait urusan luar negeri dan bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan.
3. Keyakinan pada Kemampuan Sendiri: Pada karakter ini, individu memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi akan kemampuannya menyelesaikan masalah atau mengendalikan situasi tertentu.
4. Ketidakpercayaan pada Orang Lain: Karakter ini dimiliki oleh individu yang sulit memberikan kepercayaan pada orang lain. Dalam kata lain individu memiliki kecurigaan berlebih pada orang lain, hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman hidup individu sendiri.
5. Kompleksitas Konseptual: Karakter ini merujuk pada cara pandang individu terhadap suatu masalah memiliki perbedaan dengan yang lain. Sehingga terdapat perselisihan karena perbedaan pandangan tersebut.
6. Kebutuhan Afiliasi: Dalam karakteristik persatuan, individu memiliki kecenderungan memberi perhatian kepada kerabat, dan sangat berhati-hati dalam bertindak laku sebab konsep perdamaian menjadi kebutuhan terbesarnya.
7. Kebutuhan Kekuatan dan Kekuasaan: Karakter individu ini menitikberatkan pada kekuatan negara, meliputi proses pembentukan, pemeliharaan, dan pemulihan keamanan dan pertahanan negaranya.

Dari ketujuh karakteristik pemimpin negara tersebut, kemudian diuraikan kembali dalam spesifikasi karakteristik pribadi politik, seperti di bawah ini:

1. **Ekspansionis:** Tipe karakter ini sangat agresif dalam mencapai tujuan. Individu ekspansionis ingin memegang kendali pada hal-hal besar. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kesulitan untuk memberi kepercayaan pada orang lain, sehingga individu sulit menemukan alternatif dalam keputusannya. Ekspansionis juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, individu memiliki kecenderungan untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan negaranya, walau dirinya tidak terlalu menganggap penting hubungan persahabatan.
2. **Independen Aktif:** Tipe ini memiliki antusias yang tinggi terhadap komunitas internasional tanpa mengesampingkan hubungan dengan negara lain yang telah terjalin sebelumnya. Independen aktif memiliki ciri karakter berjiwa nasionalisme tinggi, cukup percaya diri, memiliki kepercayaan terhadap orang lain, kompleksitas konseptual yang tinggi, membutuhkan afiliasi, dan tidak mengutamakan kekuasaan. Maka tipe ini berusaha untuk membangun dan menjaga hubungan dengan negara di dunia sebanyak-banyaknya.
3. **Influential:** Tipe ini memiliki ciri nasionalisme yang tinggi, kompleksitas konseptual rendah, rendahnya ketidakpercayaan pada orang lain, percaya diri yang tinggi, membutuhkan afiliasi, dan membutuhkan kekuasaan. *Influential* akan berusaha untuk mendapatkan perhatian dari sekitarnya, individu juga ingin mempengaruhi politik luar negeri negara lain. Pemimpin *Influential* akan mengutamakan kepentingan nasional, kehormatan dan kedaulatan negaranya lebih dari yang lain.

4. Mediator: Pemimpin dengan tipe mediator sangat menghindari intervensi meskipun terkadang ia memiliki pengaruh yang cukup berarti pada negara lain. Tipe pemimpin ini memiliki pandangan yang berbeda sehingga sesekali diberi kepercayaan sebagai perantara atau dimintai tanggapan terhadap sebuah isu internasional. Tujuan utama pemimpin dengan tipe ini yaitu perdamaian dunia. Ia cenderung berjiwa nasionalisme rendah, kompleksitas konseptual yang tinggi, rendahnya ketidakpercayaan pada orang lain, percaya diri yang tinggi, membutuhkan afiliasi, dan membutuhkan kekuatan (*power*).
5. Oportunis: Pemimpin oportunis memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, kompleksitas konseptual yang tinggi, percaya akan kemampuan orang lain, kurang mempercayai kemampuan diri sendiri, membutuhkan afiliasi yang rendah dan tidak terlalu mementingkan kekuasaan. Tipe ini selalu berusaha terlihat bijaksana dan mengambil keuntungan dari situasi tertentu. Pemimpin dengan tipe ini juga terbiasa mengeluarkan kebijakan spontan berdasarkan situasi dan kebutuhan serta tidak jarang mengesampingkan komitmennya terhadap ideologi.
6. Partisipatif: Pemimpin partisipatif mengacu pada karakteristik rendahnya jiwa nasionalisme, kompleksitas dan konseptual yang tinggi, memiliki kepercayaan terhadap kemampuan orang lain, rasa percaya diri yang rendah, membutuhkan afiliasi yang tinggi, dan tidak mementingkan kekuasaan. Biasanya tipe partisipatif senang memberi fasilitas kepada negara lain untuk dapat terlibat dalam arena internasional, dengan begitu individu dapat

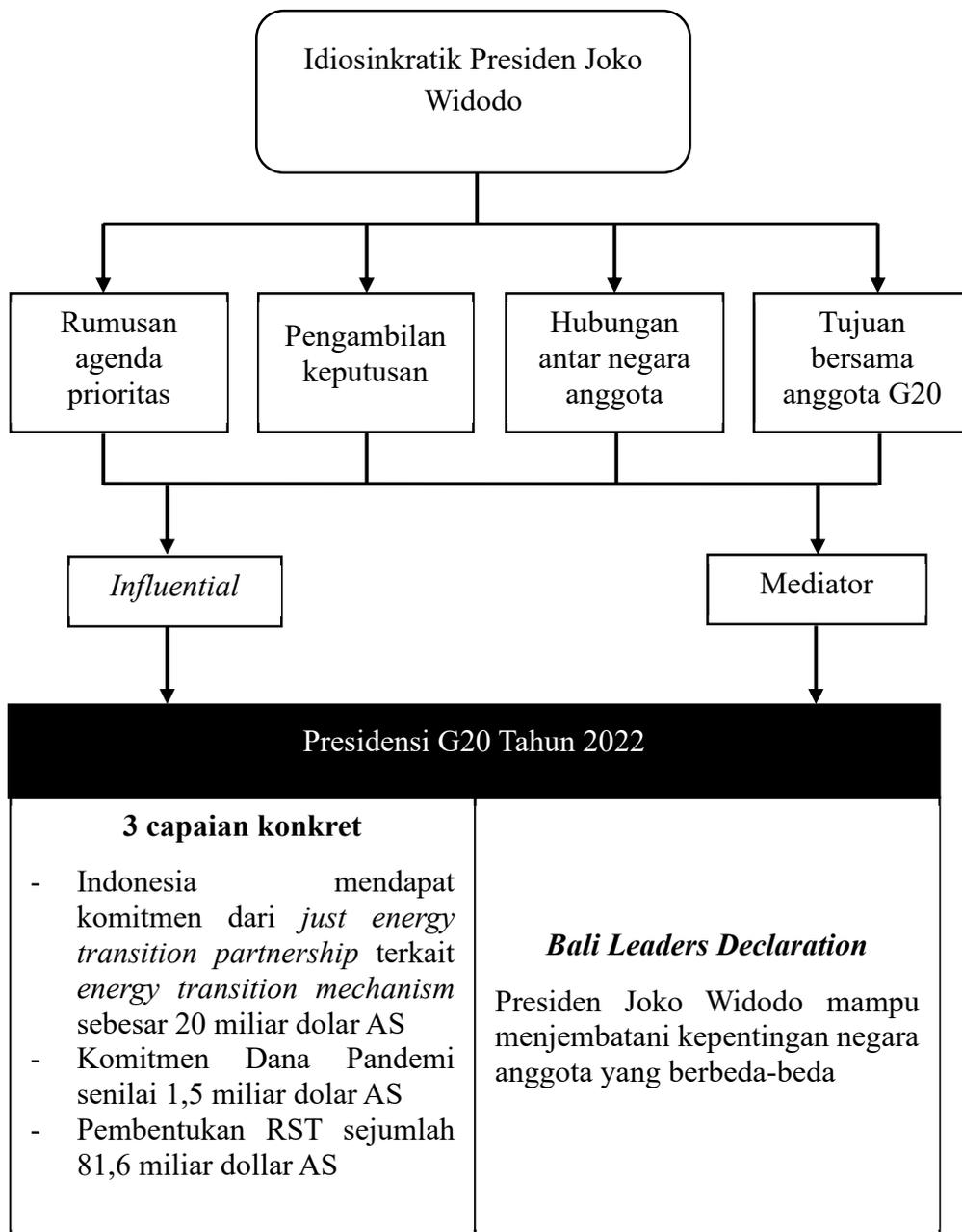
mencari nilai tambah bagi negara dan menemukan solusi lain dari masalah yang dihadapi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan uraian beberapa teori pendukung penelitian ini dalam tinjauan pustaka di atas, peneliti merumuskan kerangka pemikiran agar dapat mempermudah proses penelitian dengan mengaplikasikan teori-teori tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana faktor idiosinkratik menjadi landasan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kemudian mampu memberi pengaruh terhadap jalannya Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 mulai dari perumusan agenda prioritas, proses pengambilan keputusan, pengaruh pada hubungan antar negara anggota, hingga pengaruh pada pemenuhan tujuan bersama negara anggota yang dianggap sukses bagi seluruh tamu undangan dan warga dunia sebab dapat menghasilkan kesepakatan di tengah situasi geopolitik yang memanas.

Melihat rekam jejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama memegang presidensi G20, peneliti menggambarkan karakteristik pribadi politik Presiden Joko Widodo yaitu *influential* dan mediator. Dalam uraian latar belakang dan tinjauan pustaka, gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam presidensi G20 menunjukkan kecenderungan pada karakteristik *influential* yang dapat menghasilkan 3 capaian konkret yang dianggap menguntungkan Indonesia. Sedangkan dengan karakteristik mediatornya, G20 Indonesia menghasilkan "*G20 Bali Leaders Declaration*" yang mampu menyatukan perbedaan kepentingan negara anggota menjadi kepentingan bersama. Juga usaha beliau mengunjungi

Rusia dan Ukraina sebelum malam puncak G20, untuk memberikan pesan perdamaian menjadi bukti gaya kepemimpinan mediator Presiden Joko Widodo.



Gambar 2.2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : diolah oleh peneliti